

**PLATFORM INTEGRASI BELANJA PEMERINTAH MELALUI DIGIPAY:
PEMBERDAYAAN UMKM DAN BANGGA PRODUK INDONESIA DALAM
PERSPEKTIF NEO-WEBERIAN STATE**

**GOVERNMENT SPENDING INTEGRATION PLATFORM THROUGH DIGIPAY:
EMPOWERING MSMEs AND PRIDE IN INDONESIAN PRODUCTS FROM THE
PERSPECTIVE OF THE NEO-WEBERIAN STATE**

Tyaning Ayuni Amalia Z.¹, Bintoro Wardiyanto², Erna Setijanigrum³

Magister Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sekolah Pascasarjana, Universitas Airlangga¹
Sekolah Pascasarjana, Universitas Airlangga^{2,3}

tyaning.ayuni.amalia-2023@pasca.unair.ac.id¹, bintoro.wardiyanto@fisip.unair.ac.id²,
erna.setijanigrum@fisip.unair.ac.id³

ABSTRACT

This study analyzes the implementation of Digipay, a digital platform for government procurement, in the context of empowering MSMEs and strengthening the Proudly Indonesian Products movement through the perspective of the Neo-Weberian State (NWS). The research employs a qualitative approach using a literature review method, collecting data from various secondary sources such as journal articles, government reports, and online news, which are then analyzed descriptively. The analysis reveals that Digipay facilitates MSMEs' access to government markets, increases sales, and supports business development through digitalization. It also plays a significant role in promoting and facilitating the purchase of domestic products by government agencies. The implementation of Digipay reflects key characteristics of the NWS, including results orientation, accountability and transparency, flexibility and responsiveness, and professionalism focused on public value. However, the implementation of Digipay faces challenges related to infrastructure and digital literacy, discrepancies in bank mechanisms, and limited human resources. Therefore, this study recommends enhancing infrastructure and digital literacy, harmonizing platform mechanisms, strengthening MSME human resource capacity, expanding features and services, integrating systems, conducting extensive outreach, and implementing continuous monitoring and evaluation to maximize Digipay's potential in supporting efficient government procurement, MSME empowerment, and national economic growth.

Keywords: Digipay, UMKM, Neo-Weberian State.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis implementasi Digipay, platform digital pengadaan pemerintah, dalam konteks pemberdayaan UMKM dan penguatan gerakan Bangga Produk Indonesia melalui perspektif Neo-Weberian State (NWS). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, mengumpulkan data dari berbagai sumber sekunder seperti artikel jurnal, laporan pemerintah, dan berita daring, yang kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil analisis menunjukkan bahwa Digipay memfasilitasi akses UMKM ke pasar pemerintah, meningkatkan penjualan, dan mendukung pengembangan usaha melalui digitalisasi, serta berperan penting dalam mempromosikan dan memfasilitasi pembelian produk dalam negeri oleh instansi pemerintah. Implementasi Digipay juga mencerminkan karakteristik utama NWS, yaitu orientasi pada hasil, akuntabilitas dan transparansi, fleksibilitas dan responsivitas, serta profesionalisme berorientasi nilai publik. Meskipun demikian, implementasi Digipay menghadapi tantangan terkait infrastruktur dan literasi digital, perbedaan mekanisme antar bank, dan keterbatasan SDM. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan infrastruktur dan literasi digital, harmonisasi mekanisme platform, penguatan kapasitas SDM UMKM, perluasan fitur dan layanan, integrasi sistem, sosialisasi masif, serta monitoring dan evaluasi berkelanjutan untuk memaksimalkan potensi Digipay dalam mendukung pengadaan pemerintah yang efisien, pemberdayaan UMKM, dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Kata Kunci: Digipay, UMKM, Neo-Weberian State.

PENDAHULUAN

UMKM di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam mengakses

pasar pengadaan barang/jasa pemerintah, di antaranya kompleksitas prosedur pengadaan, kurangnya informasi

mengenai tender, dan persaingan dengan usaha yang lebih besar (Kemenkeu, 2024). Padahal, pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian dan mendukung UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Oleh karena itu, pengadaan yang efisien dan transparan sangat penting untuk memastikan penggunaan anggaran negara yang optimal dan mencegah praktik korupsi (Londa et al., 2022). Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri melalui pengadaan pemerintah, seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ('Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah', 2024), yang menekankan pentingnya kampanye #BanggaBuatanIndonesia (Londa et al., 2022). Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat UMKM, mengurangi ketergantungan pada impor, dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar domestik maupun internasional.

Pemberdayaan UMKM merupakan upaya multidimensional untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas UMKM agar dapat berkontribusi secara optimal dalam perekonomian nasional (Tambunan, 2009, p. 3). Konsep ini mencakup berbagai aspek, mulai dari akses pembiayaan, pelatihan manajemen, hingga perluasan akses pasar. Indikator keberhasilan pemberdayaan UMKM dapat diukur melalui peningkatan omzet, penyerapan tenaga kerja, dan kontribusi terhadap PDB. Namun, UMKM masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan modal, kurangnya inovasi, dan persaingan yang ketat. Dalam

konteks ini, gerakan Bangga Produk Indonesia menjadi penting sebagai strategi untuk meningkatkan permintaan terhadap produk UMKM di pasar domestik. Gerakan ini tidak hanya menekankan pentingnya penggunaan produk dalam negeri, tetapi juga mencakup strategi promosi yang efektif, seperti kampanye pemasaran digital dan pameran produk (Syahbani et al., 2024). Peningkatan permintaan terhadap produk dalam negeri diharapkan dapat berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan identitas nasional.

Dalam upaya memfasilitasi pemberdayaan UMKM dan mendorong penggunaan produk dalam negeri, pemerintah telah mengembangkan berbagai platform digital, salah satunya adalah Digipay. Digipay merupakan platform digital yang dirancang untuk mempermudah transaksi pengadaan barang/jasa pemerintah, khususnya antara instansi pemerintah dengan UMKM (Utami, 2022). Fitur-fitur Digipay mencakup katalog produk, sistem pembayaran digital, dan pelaporan transaksi yang transparan. Mekanisme transaksi di Digipay didasarkan pada prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi, yang sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance*. Implementasi Digipay diharapkan dapat mengatasi berbagai kendala yang sebelumnya dihadapi UMKM dalam mengakses pasar pemerintah, seperti prosedur pengadaan yang rumit dan kurangnya informasi. Dengan demikian, Digipay berperan penting dalam implementasi kebijakan pemerintah terkait pemberdayaan UMKM dan gerakan Bangga Produk Indonesia.

Implementasi Digipay dapat dianalisis melalui lensa konsep *Neo-Weberian State* (NWS). Konsep ini

menekankan pentingnya profesionalisme, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam birokrasi pemerintahan (Bouckaert, 2023). Digipay, dengan penggunaan teknologi digital, mencerminkan upaya modernisasi birokrasi yang berorientasi pada efisiensi dan efektivitas. Fitur-fitur seperti sistem pembayaran digital dan pelaporan transaksi yang transparan mendukung akuntabilitas dan transparansi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Selain itu, penggunaan platform digital juga menuntut adanya profesionalisme dalam pengelolaan sistem dan data. Dengan demikian, Digipay tidak hanya memfasilitasi transaksi pengadaan, tetapi juga berkontribusi pada reformasi birokrasi yang lebih modern dan akuntabel, sejalan dengan karakteristik *Neo-Weberian State*.

Dalam kajian akademik, konsep NWS telah menjadi perbincangan para sarjana dalam berbagai konteks. Di Brazil, model NWS berpotensi untuk menjadi acuan untuk reformasi administrasi publik. Artikel yang ditulis oleh Alexandre Gomide dkk ini menyimpulkan bahwa NWS dapat menjadi acuan yang baik dengan menekankan ketahanan, efektivitas, dan legitimasi, namun perlu disesuaikan dengan konteks Brazil (Gomide & Lotta, 2024). Hal ini juga sejalan dengan konteks Meksiko, yang mana konsep NWS juga bisa memperkuat kapasitas negara Meksiko dalam menangani tantangan sosial-politik melalui reformasi administrasi publik (Galego & Nieto-Morales, 2024). Selain itu, artikel yang lain menyoroti konsep NWS yang bisa diintegrasikan dengan public value (PV). Dalam artian, konsep NWS sebagai model dan ideal type, serta konsep PV sebagai penambahan nilai melalui tindakan manajer publik dan kontribusi terhadap ruang publik

(Ongaro, 2024). Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Digipay dalam pemberdayaan UMKM dan mengkaji implementasinya dalam kerangka *Neo-Weberian State* (NWS). Untuk mencapai tujuan tersebut, permasalahan yang hendak dijawab dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana Digipay memberdayakan UMKM dan mendorong penggunaan produk Indonesia? Bagaimana implementasi Digipay dilihat dari perspektif *Neo-Weberian State*?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*literature review*) untuk menganalisis implementasi Digipay. Data dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder yang relevan, seperti artikel jurnal ilmiah, laporan resmi pemerintah, berita daring, dan publikasi lainnya yang membahas tentang Digipay, pengadaan pemerintah, UMKM, *Neo-Weberian State*, dan digitalisasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi pola, tema, dan argumen yang relevan dengan rumusan masalah penelitian, yaitu pemberdayaan UMKM, dorongan Bangsa Produk Indonesia, implementasi dalam perspektif NWS, serta tantangan dan peluang implementasi Digipay. Pendekatan studi literatur dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis konsep dan implementasi kebijakan yang telah didokumentasikan, bukan pengumpulan data empiris secara langsung dari lapangan.

Kerangka Konseptual

Konsep NWS di Brazil (Building Resilience, Agility, and Trust: The Neo-Weberian State as a Referential Model for Brazilian Public Administration oleh Alexandre Gomide dan Gabriela Lotta)

Artikel ini berpusat pada konsep *Neo-Weberian State* (NWS) sebagai model referensi untuk reformasi administrasi publik, khususnya di Brasil. NWS merupakan evolusi dari birokrasi Weberian yang klasik, yang menekankan pada hierarki, aturan formal, dan impersonalitas. NWS mempertahankan beberapa elemen Weberian, seperti profesionalisme dan efisiensi, tetapi menambahkan dimensi baru yang lebih relevan dengan konteks kontemporer, seperti fleksibilitas, orientasi pada hasil, akuntabilitas publik, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kerangka teoretisnya dibangun di atas literatur administrasi publik modern, teori organisasi, dan studi tentang reformasi birokrasi di berbagai negara. Artikel ini juga membahas konsep-konsep terkait seperti *New Public Management* (NPM), *governance*, dan kapasitas negara (*state capacity*) untuk memperjelas perbedaan dan persamaan dengan NWS. Intinya, NWS dipandang sebagai model yang lebih adaptif dan responsif dibandingkan model Weberian klasik, yang lebih cocok untuk menghadapi tantangan kompleks di era globalisasi.

Artikel ini secara spesifik membahas konteks administrasi publik di Brasil, yang menghadapi berbagai tantangan, termasuk inefisiensi, korupsi, dan kurangnya kepercayaan publik. Reformasi birokrasi di Brasil telah dilakukan selama beberapa dekade, tetapi hasilnya belum optimal. Artikel ini mengusulkan NWS sebagai model yang potensial untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Konteks global juga menjadi perhatian, dengan menekankan perlunya administrasi publik yang tangguh (*resilient*) dan lincah (*agile*) untuk menghadapi krisis dan perubahan yang cepat. Pandemi COVID-19 dijadikan contoh bagaimana kapasitas negara dan efektivitas administrasi

publik sangat krusial dalam merespons krisis. Oleh karena itu, artikel ini berargumen bahwa adopsi prinsip-prinsip NWS dapat membantu Brasil membangun administrasi publik yang lebih efektif, akuntabel, dan dipercaya oleh masyarakat.

Inti dari artikel ini adalah argumen bahwa NWS menawarkan kerangka kerja yang relevan untuk reformasi administrasi publik di Brasil. NWS tidak hanya menekankan pada efisiensi dan profesionalisme, tetapi juga pada nilai-nilai seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik (Gomide & Lotta, 2024). Dengan demikian, Konsep NWS dalam artikel ini sangat relevan dengan efektivitas Digipay dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia. Beberapa poin penting yang menghubungkan keduanya:

- a. Efisiensi dan Profesionalisme: Digipay, sebagai platform digital, meningkatkan efisiensi transaksi pengadaan barang/jasa pemerintah. Proses yang sebelumnya rumit dan memakan waktu dapat disederhanakan melalui sistem digital. Hal ini sejalan dengan prinsip efisiensi dan profesionalisme dalam NWS (Hardiputra, 2022).
- b. Akuntabilitas dan Transparansi: Digipay menyediakan catatan transaksi yang transparan dan mudah diakses, sehingga meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran pemerintah. Hal ini sesuai dengan penekanan pada akuntabilitas dan transparansi dalam NWS (KPPN, 2021).
- c. Orientasi pada Hasil: Dengan mempermudah akses UMKM ke pasar pemerintah, Digipay berkontribusi pada peningkatan omzet dan pertumbuhan UMKM. Hal ini sejalan dengan orientasi pada hasil yang ditekankan dalam NWS (Nadia, n.d.).

- d. Adaptabilitas dan Responsif: Digipay sebagai platform digital dapat terus dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, baik pemerintah maupun UMKM. Hal ini mencerminkan prinsip adaptabilitas dan responsif dalam NWS (Supriyanto, 2024).

Dengan demikian, Digipay dapat dilihat sebagai salah satu implementasi konkret dari prinsip-prinsip NWS dalam konteks Indonesia, khususnya dalam upaya pemberdayaan UMKM. Platform ini tidak hanya memfasilitasi transaksi, tetapi juga berkontribusi pada reformasi birokrasi yang lebih modern, efisien, akuntabel, dan transparan. Implementasi Digipay yang berhasil dapat menjadi contoh bagaimana adopsi prinsip-prinsip NWS dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif.

Konsep NWS di Meksiko (Navigating Public Administration Reforms and Democracy: Toward a Neo-Weberian State in Mexico)

Artikel ini membahas reformasi administrasi publik di Meksiko melalui lensa *Neo-Weberian State* (NWS). Sebagai kerangka teoretis, NWS diposisikan sebagai evolusi dari model birokrasi Weberian yang klasik. Model Weberian menekankan pada hierarki, aturan formal, impersonalitas, dan efisiensi melalui spesialisasi. Namun, model ini sering dikritik karena kurang fleksibel dan kurang responsif terhadap perubahan lingkungan. NWS mempertahankan beberapa aspek positif dari Weberian, seperti profesionalisme dan efisiensi, tetapi menambahkan dimensi baru yang lebih relevan dengan konteks demokrasi modern. Dimensi-dimensi tersebut mencakup akuntabilitas publik, transparansi, responsivitas terhadap kebutuhan warga negara, dan orientasi pada pelayanan publik yang

berkualitas. Artikel ini juga menyinggung konsep *New Public Management* (NPM) yang sempat dominan dalam reformasi administrasi publik global. Perbedaan utama antara NWS dan NPM terletak pada penekanan NWS pada peran negara yang kuat dan fokus pada nilai-nilai publik, sementara NPM lebih berorientasi pada mekanisme pasar dan efisiensi ekonomi. Secara ringkas, NWS menawarkan kerangka teoretis untuk membangun administrasi publik yang efisien, akuntabel, dan responsif dalam konteks demokrasi.

Artikel ini secara spesifik membahas konteks Meksiko, yang telah mengalami transisi demokrasi dan upaya reformasi administrasi publik selama beberapa dekade. Meksiko menghadapi tantangan dalam membangun institusi publik yang kuat, efisien, dan bebas dari korupsi. Transisi demokrasi menuntut adanya administrasi publik yang lebih akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan warga negara. Artikel ini menyoroti bagaimana reformasi administrasi publik di Meksiko dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tekanan internasional, dinamika politik domestik, dan tuntutan masyarakat sipil. Konteks ini menekankan perlunya adaptasi model reformasi administrasi publik dengan realitas politik dan sosial di Meksiko. Oleh karena itu, NWS dipandang sebagai model yang berpotensi untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut dengan menyeimbangkan efisiensi birokrasi dengan nilai-nilai demokrasi.

Inti dari artikel ini adalah argumen bahwa transisi menuju NWS dapat memperkuat demokrasi di Meksiko melalui peningkatan kinerja administrasi publik. Artikel ini berpendapat bahwa karakteristik NWS, seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik, sangat penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah

dan memperkuat legitimasi demokrasi (Galego & Nieto-Morales, 2024). Meskipun artikel ini berfokus pada konteks Meksiko, prinsip-prinsip NWS yang diuraikan di dalamnya sangat relevan dengan efektivitas Digipay dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia. Berikut beberapa kaitannya:

- a. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Digipay, sebagai platform digital, menyediakan catatan transaksi yang transparan dan mudah diakses oleh publik. Hal ini sejalan dengan penekanan NWS pada transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran publik dan proses pengadaan. Dengan adanya Digipay, proses pengadaan menjadi lebih terbuka dan dapat diawasi, sehingga mengurangi potensi korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik.
- b. **Efisiensi dan Profesionalisme:** Digipay meningkatkan efisiensi proses pengadaan dengan mengurangi birokrasi dan mempermudah transaksi antara pemerintah dan UMKM. Hal ini sejalan dengan penekanan NWS pada efisiensi dan profesionalisme dalam birokrasi. Dengan proses yang lebih efisien, UMKM dapat lebih mudah berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah dan meningkatkan daya saing mereka.
- c. **Responsivitas dan Pelayanan Publik:** Dengan mempermudah akses UMKM ke pasar pemerintah, Digipay berkontribusi pada peningkatan pelayanan publik secara keseluruhan. UMKM dapat menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan pemerintah dengan lebih cepat dan efisien, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan penekanan NWS pada responsivitas dan pelayanan publik yang berkualitas (Supriyanto, 2024).

Singkatnya, Digipay dapat dilihat sebagai implementasi praktis dari prinsip-prinsip NWS dalam konteks Indonesia. Platform ini tidak hanya memfasilitasi transaksi ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada reformasi administrasi publik yang lebih transparan, akuntabel, efisien, dan responsif. Dengan demikian, Digipay mendukung pemberdayaan UMKM dan sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Integrasi NWS dan Public Value (Nilai Publik) (Integrating the neo-Weberian state and public value)

Artikel ini membahas integrasi antara konsep *Neo-Weberian State* (NWS) dan *public value* (PV) sebagai kerangka teoretis untuk memahami dan mereformasi administrasi publik. NWS, sebagai evolusi dari birokrasi Weberian yang klasik, mempertahankan penekanan pada efisiensi, profesionalisme, dan hierarki, tetapi menambahkan dimensi baru seperti akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Sementara itu, PV berfokus pada penciptaan nilai bagi masyarakat melalui pelayanan publik yang efektif dan efisien. Kerangka teoretis dalam artikel ini mencoba menjembatani kedua konsep tersebut, dengan argumen bahwa administrasi publik yang ideal harus mampu menghasilkan PV melalui penerapan prinsip-prinsip NWS. Artinya, birokrasi yang efisien dan profesional harus diarahkan untuk menciptakan dampak positif bagi masyarakat, bukan hanya sekadar menjalankan prosedur formal. Artikel ini juga membahas perbedaan dan persamaan NWS dengan paradigma administrasi publik lainnya, seperti *New Public Management* (NPM) dan *New Public Service* (NPS), untuk

memperjelas posisinya dalam lanskap teoretis administrasi publik.

Artikel ini ditulis dalam konteks kebutuhan akan reformasi administrasi publik yang lebih responsif dan akuntabel di era globalisasi dan digitalisasi. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas dan efisien semakin meningkat, sementara kepercayaan publik terhadap pemerintah seringkali rendah. Konteks ini menuntut adanya model administrasi publik yang mampu menjawab tantangan tersebut. Artikel ini berargumen bahwa integrasi NWS dan PV menawarkan solusi yang relevan, dengan menekankan pentingnya menciptakan nilai bagi masyarakat melalui birokrasi yang efisien dan akuntabel. Konteks digitalisasi juga disinggung, dengan implikasi bahwa teknologi dapat menjadi *enabler* untuk menciptakan PV melalui peningkatan efisiensi, transparansi, dan partisipasi publik (Ongaro, 2024).

Integrasi NWS dan PV sangat relevan dengan efektivitas Digipay dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia. Berikut beberapa kaitannya:

- a. Efisiensi dan Profesionalisme (NWS): Digipay, sebagai platform digital, meningkatkan efisiensi proses pengadaan pemerintah. Transaksi yang sebelumnya rumit dan memakan waktu dapat disederhanakan melalui sistem digital. Hal ini sejalan dengan prinsip efisiensi dan profesionalisme dalam NWS. Proses yang lebih efisien juga mengurangi *transaction cost* bagi UMKM, sehingga meningkatkan daya saing mereka.
- b. Penciptaan PV: Dengan mempermudah akses UMKM ke pasar pemerintah, Digipay menciptakan PV dalam beberapa hal:
 - 1) Peningkatan Ekonomi UMKM: Peningkatan omzet dan pertumbuhan UMKM

berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja.

- 2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: UMKM dapat menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan pemerintah dengan lebih cepat dan efisien, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
 - 3) Penguatan Ekonomi Lokal: Pemberdayaan UMKM melalui Digipay dapat memperkuat ekonomi lokal dan mengurangi kesenjangan ekonomi antar daerah (Utami, 2022).
- c. Akuntabilitas dan Transparansi: Digipay menyediakan catatan transaksi yang transparan dan mudah diakses oleh publik, sehingga meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran pemerintah. Hal ini juga mencegah potensi korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Dengan demikian, Digipay dapat dilihat sebagai implementasi konkret dari integrasi NWS dan PV dalam konteks Indonesia. Platform ini tidak hanya memfasilitasi transaksi ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada penciptaan nilai publik yang lebih luas melalui pemberdayaan UMKM, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik. Digipay membuktikan bahwa birokrasi yang efisien dan profesional (NWS) dapat diarahkan untuk menciptakan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat (*public value*).

Dari Weberian klasik ke NWS (The neo-Weberian state: From ideal type model to reality? oleh Geert Bouckaert)

Artikel ini membahas evolusi konsep birokrasi dari model ideal Weberian ke *Neo-Weberian State* (NWS). Model Weberian klasik, yang dirumuskan oleh Max Weber, menekankan pada karakteristik seperti hierarki yang jelas, aturan formal yang ketat, impersonalitas (tidak memihak), spesialisasi, dan efisiensi. Model ini ideal untuk stabilitas dan prediktabilitas, tetapi sering dikritik karena kurang fleksibel dan lambat dalam merespons perubahan. NWS muncul sebagai respons terhadap kritik tersebut dan tuntutan zaman modern. NWS mempertahankan beberapa elemen inti Weberian, seperti profesionalisme dan efisiensi, tetapi menambahkan dimensi baru yang lebih adaptif, seperti orientasi pada hasil (*outcome*), akuntabilitas publik, transparansi, fleksibilitas, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Artikel ini secara eksplisit membahas perbedaan NWS dengan model *New Public Management* (NPM) yang sempat populer. NPM menekankan pada mekanisme pasar, desentralisasi, dan kompetisi dalam pelayanan publik, sementara NWS lebih menekankan pada peran negara yang kuat dan fokus pada nilai-nilai publik. Jadi, kerangka teoretis artikel ini berpusat pada perbandingan dan evolusi model birokrasi, dari Weberian ke NWS, dengan mempertimbangkan konteks dan tantangan modern.

Artikel ini ditulis dalam konteks reformasi administrasi publik di berbagai negara yang menghadapi tantangan kompleks di era globalisasi dan digitalisasi. Beberapa tantangan yang diidentifikasi antara lain: tuntutan akan pelayanan publik yang lebih berkualitas dan efisien, kebutuhan akan akuntabilitas dan transparansi yang lebih besar, serta perlunya respons yang cepat dan adaptif terhadap perubahan lingkungan. Konteks krisis ekonomi dan

pandemi juga memperkuat kebutuhan akan administrasi publik yang tangguh dan responsif. Bouckaert menyoroti bagaimana model Weberian klasik seringkali tidak memadai untuk menghadapi tantangan-tantangan ini, sehingga muncul kebutuhan akan model yang lebih adaptif, yaitu NWS. Konteks ini juga mencakup perdebatan dan implementasi NPM di berbagai negara, serta kritik terhadap pendekatan tersebut. Artikel ini berargumen bahwa NWS menawarkan alternatif yang lebih baik daripada NPM, dengan menyeimbangkan efisiensi birokrasi dengan nilai-nilai publik dan akuntabilitas.

Inti dari artikel ini adalah argumen bahwa NWS menawarkan model yang lebih relevan dan efektif untuk administrasi publik di era modern dibandingkan model Weberian klasik atau NPM. Bouckaert menjelaskan bahwa NWS bukanlah sekadar “Weberian baru,” tetapi merupakan evolusi yang signifikan (Bouckaert, 2023). Dalam kaitannya dengan Digipay, ia dapat dilihat sebagai implementasi konkret dari prinsip-prinsip NWS dalam konteks Indonesia. Platform ini tidak hanya memfasilitasi transaksi ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada reformasi birokrasi yang lebih efisien, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil, khususnya dalam pemberdayaan UMKM. Dengan demikian, Digipay mendukung pencapaian *public value* melalui modernisasi birokrasi dan pemberdayaan ekonomi.

NWS di Korea Selatan, Mungkinkah? (The Hierarchy-Oriented Bureaucracy of South Korea: A Type of Neo-Weberian State? Oleh Tobin IM dan Seyeong Cha)

Artikel ini menganalisis birokrasi Korea Selatan melalui lensa *Neo-Weberian State* (NWS). Kerangka

teoretisnya berpusat pada perbandingan antara birokrasi Weberian klasik dengan NWS. Birokrasi Weberian, yang dicetuskan oleh Max Weber, menekankan pada hierarki yang ketat, aturan formal yang rinci, impersonalitas (netralitas), spesialisasi, dan efisiensi. Namun, model ini sering dikritik karena kurang fleksibel dan lambat dalam merespons perubahan. NWS muncul sebagai respons terhadap kritik ini, dengan mempertahankan beberapa elemen Weberian (seperti profesionalisme dan efisiensi), tetapi menambahkan dimensi baru yang lebih adaptif, seperti orientasi pada hasil (*outcome*), akuntabilitas publik, transparansi, fleksibilitas, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Artikel ini secara khusus meneliti apakah birokrasi Korea Selatan, yang dikenal dengan orientasi hierarkinya yang kuat, dapat dikategorikan sebagai NWS. Artinya, artikel ini mempertanyakan apakah Korea Selatan berhasil mengintegrasikan elemen-elemen NWS ke dalam struktur birokrasi yang masih sangat hierarkis.

Artikel ini ditulis dalam konteks perkembangan pesat Korea Selatan sebagai negara maju dengan birokrasi yang kuat dan berperan penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Korea Selatan dikenal dengan tradisi birokrasi yang sangat hierarkis, yang berakar pada sejarah dan budaya Konfusianisme. Meskipun demikian, Korea Selatan juga telah melakukan berbagai reformasi administrasi publik untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan responsivitas birokrasi. Artikel ini meneliti bagaimana Korea Selatan menyeimbangkan tradisi hierarki yang kuat dengan tuntutan modernisasi administrasi publik, khususnya dalam konteks NWS. Konteks global dan regional juga menjadi pertimbangan, dengan membandingkan birokrasi Korea

Selatan dengan negara-negara lain di Asia Timur dan negara-negara maju lainnya.

Inti dari artikel ini adalah analisis tentang karakteristik birokrasi Korea Selatan dan penentuan apakah birokrasi tersebut dapat dikategorikan sebagai NWS. Artikel ini mengidentifikasi beberapa karakteristik utama birokrasi Korea Selatan:

- a. Hierarki yang Kuat: Struktur organisasi yang sangat hierarkis dengan garis komando yang jelas dan otoritas yang terpusat.
- b. Orientasi pada Elite: Rekrutmen dan promosi pegawai negeri sipil yang sangat selektif dan berorientasi pada lulusan universitas-universitas ternama.
- c. Kekuasaan Negara yang Kuat: Peran negara yang dominan dalam perencanaan dan implementasi kebijakan publik.
- d. Fokus pada Pembangunan Ekonomi: Prioritas utama birokrasi pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur (Im & Cha, 2024).

Meskipun birokrasi Korea Selatan masih sangat hierarkis, artikel ini berargumen bahwa birokrasi tersebut juga menunjukkan beberapa karakteristik NWS, seperti fokus pada hasil, peningkatan akuntabilitas, dan upaya untuk meningkatkan responsivitas. Artikel ini menyimpulkan bahwa birokrasi Korea Selatan dapat dianggap sebagai jenis NWS yang unik, dengan karakteristik hierarki yang kuat sebagai ciri khasnya. Artikel ini juga menekankan bahwa keberhasilan Korea Selatan dalam pembangunan ekonomi dan sosial tidak terlepas dari peran birokrasinya yang kuat dan efektif, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan dalam hal transparansi, partisipasi publik, dan fleksibilitas.

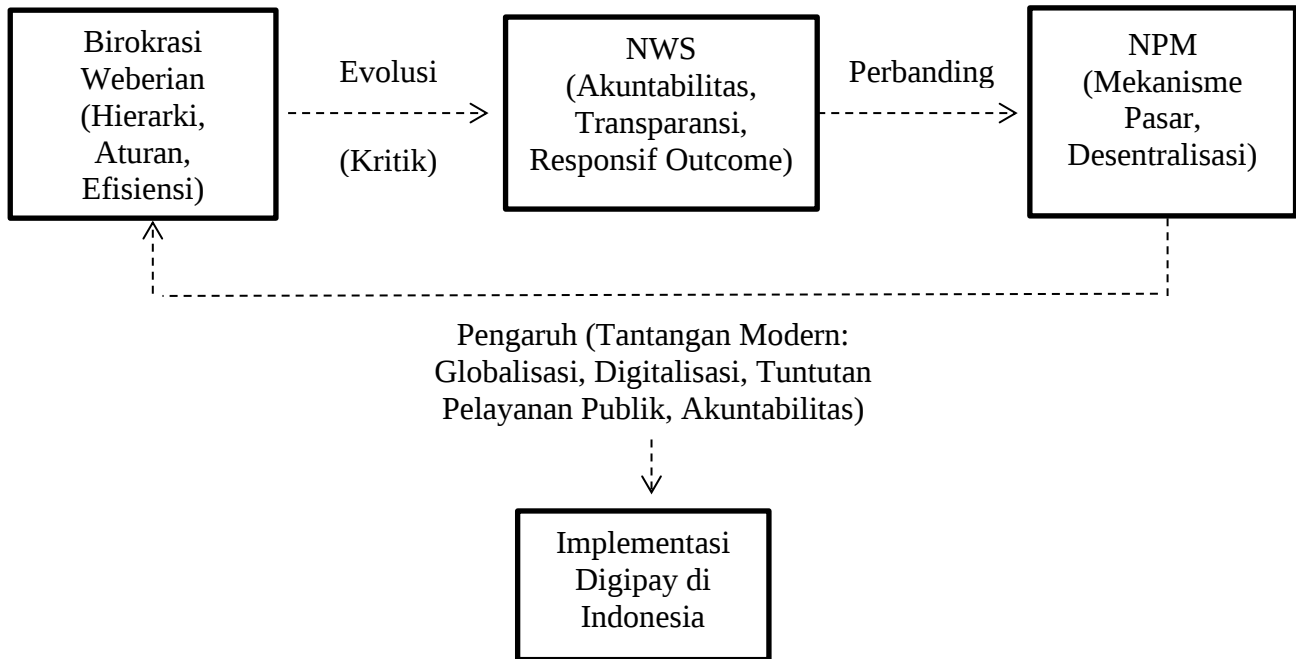
Perbedaan konteks antara Korea Selatan dan Indonesia perlu diperhatikan. Korea Selatan memiliki birokrasi yang sangat hierarkis dan kuat, sementara Indonesia masih berupaya memperkuat kapasitas birokrasinya. Namun, prinsip-prinsip NWS, seperti efisiensi, akuntabilitas, dan orientasi pada hasil, tetap relevan sebagai panduan reformasi birokrasi di Indonesia. Dalam konteks ini, Digipay dapat dilihat sebagai salah satu upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip NWS dalam pengadaan pemerintah dan pemberdayaan UMKM. Dengan demikian, meskipun konteksnya berbeda, artikel tentang birokrasi Korea Selatan memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana prinsip-prinsip NWS dapat diimplementasikan untuk meningkatkan efektivitas birokrasi dan mencapai tujuan pembangunan, termasuk pemberdayaan UMKM melalui platform seperti Digipay.

Framework

Kelima artikel tersebut di atas memiliki benang merah yang kuat, yaitu evolusi dan adaptasi model birokrasi dalam menghadapi tantangan zaman modern, dengan penekanan khusus pada konsep *Neo-Weberian State* (NWS). Artikel-artikel tersebut menelusuri bagaimana model birokrasi Weberian yang klasik, dengan penekanan pada hierarki, aturan formal, dan efisiensi, telah berkembang untuk

mengakomodasi tuntutan akuntabilitas publik, transparansi, responsivitas, dan orientasi pada hasil (*outcome*). NWS muncul sebagai respons terhadap kritik terhadap model Weberian yang dianggap kurang fleksibel dan lambat dalam merespons perubahan. Beberapa artikel membandingkan NWS dengan *New Public Management* (NPM), menyoroti perbedaan fokus antara mekanisme pasar (NPM) dan peran negara yang kuat dengan nilai-nilai publik (NWS). Selain itu, ada pula artikel yang meneliti implementasi NWS di konteks negara tertentu, seperti Korea Selatan, dan bagaimana karakteristik budaya dan sejarah memengaruhi adaptasi konsep tersebut. Secara keseluruhan, benang merah kelima artikel ini adalah eksplorasi konsep NWS sebagai model ideal untuk administrasi publik yang efektif dan akuntabel di era modern, dengan mempertimbangkan berbagai konteks dan tantangan yang dihadapi. Implikasinya terhadap Digipay adalah bagaimana platform digital tersebut dapat dipandang sebagai perwujudan prinsip-prinsip NWS dalam konteks Indonesia, khususnya dalam pemberdayaan UMKM melalui peningkatan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan orientasi pada hasil.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat digambarkan ke dalam bagan berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Pemberdayaan UMKM melalui Digipay

Pemberdayaan UMKM melalui Digipay merupakan inisiatif penting dalam konteks modernisasi pengadaan pemerintah dan pengembangan ekonomi digital di Indonesia. Digipay, sebagai *marketplace* yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan bekerja sama dengan bank-bank BUMN (BRI, Bank Mandiri, dan BNI), berfungsi sebagai platform yang menghubungkan Satuan Kerja (Satker) pengguna APBN dengan UMKM sebagai penyedia barang/jasa. Transaksi di Digipay difasilitasi melalui pembayaran digital menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan/atau *Cash Management System Virtual Account* (CMS VA), menciptakan ekosistem digital yang terintegrasi (Nadia, n.d.).

Salah satu aspek penting dari inisiatif ini adalah kemudahan akses ke pasar pemerintah. Sebelumnya, UMKM sering menghadapi kesulitan dalam berpartisipasi dalam pengadaan

pemerintah karena proses yang rumit dan birokratis. Digipay menyederhanakan proses ini dengan menyediakan platform digital yang transparan dan efisien. UMKM dapat mendaftar secara mandiri *online* melalui salah satu Satker pemerintah (Hidayati, 2022), mempromosikan produk mereka, dan bersaing secara adil untuk mendapatkan kontrak pengadaan. Dengan demikian, Digipay membuka peluang pasar yang lebih luas bagi UMKM dan mengurangi hambatan masuk yang sebelumnya ada (Nadia, n.d.).

Selain memfasilitasi akses pasar, Digipay juga berpotensi meningkatkan penjualan UMKM. Dengan terintegrasi dalam ekosistem pengadaan pemerintah, UMKM memiliki akses ke pasar yang stabil dan terjamin. Nilai belanja dalam APBN yang besar merupakan potensi pasar yang signifikan bagi UMKM (Rachmadi, n.d.). Semakin banyak transaksi yang dilakukan UMKM melalui Digipay, semakin besar pula peluang mereka untuk memperluas pasar dan meningkatkan omzet usaha (Nadia,

n.d.). Hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk mendorong digitalisasi UMKM dan pertumbuhan ekonomi nasional (Patulak, 2024).

Lebih lanjut, Digipay tidak hanya berdampak pada peningkatan penjualan jangka pendek, tetapi juga mendukung pengembangan usaha UMKM secara berkelanjutan. Dengan bertransaksi di platform digital seperti Digipay, UMKM terbiasa dengan transaksi digital dan meningkatkan literasi digital mereka (Rachmadi, n.d.). Hal ini penting dalam konteks ekonomi digital yang semakin berkembang. Selain itu, aktivitas transaksi yang tercatat di Digipay dapat menjadi modal bagi UMKM untuk mengakses fasilitas pembiayaan dari perbankan (Nadia, n.d.). Data transaksi yang transparan dan terverifikasi dapat meningkatkan kepercayaan lembaga keuangan terhadap UMKM dan mempermudah proses pengajuan pinjaman. Dukungan pemerintah melalui pelatihan, pendampingan, program, dan insentif juga melengkapi upaya pemberdayaan UMKM melalui Digipay (Patulak, 2024).

Dengan demikian, Digipay berperan penting dalam memfasilitasi UMKM mengakses pasar pemerintah, meningkatkan penjualan, dan mengembangkan usaha. Platform ini tidak hanya menyederhanakan proses pengadaan, tetapi juga mendorong digitalisasi UMKM, meningkatkan literasi digital, dan mempermudah akses ke pembiayaan. Digipay merupakan salah satu upaya Kementerian Keuangan dalam melakukan digitalisasi transaksi belanja APBN sekaligus digitalisasi UMKM (Rachmadi, n.d.), yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Peran Digipay dalam Mendorong Bangga Produk Indonesia

Digipay memegang peranan penting dalam mendorong gerakan Bangga Produk Indonesia, sebuah inisiatif pemerintah untuk meningkatkan penggunaan produk-produk dalam negeri. Peran ini diwujudkan melalui dua cara utama: promosi dan fasilitasi pembelian produk dalam negeri oleh instansi pemerintah. Sebagai *marketplace* digital yang dirancang khusus untuk transaksi pengadaan barang/jasa pemerintah, Digipay secara inheren memprioritaskan UMKM dan produk lokal (Hidayati, 2022; Nadia, n.d.; Sulsel, 2022). Hal ini berbeda dengan platform *e-commerce* umum yang seringkali menjual berbagai produk impor. Dengan demikian, Digipay secara langsung mendukung program Bangga Produk Indonesia dengan menyediakan wadah eksklusif bagi produk-produk dalam negeri.

Dari segi promosi, Digipay menampilkan produk-produk UMKM dalam katalog digital yang mudah diakses oleh seluruh Satuan Kerja (Satker) pengguna APBN (Hidayati, 2022). Tampilan ini memberikan visibilitas yang lebih besar bagi produk-produk lokal di mata instansi pemerintah. Informasi detail mengenai produk, termasuk deskripsi, harga, dan spesifikasi, tersedia lengkap di platform, memudahkan Satker untuk melakukan perbandingan dan pemilihan (Nadia, n.d.). Selain itu, beberapa sumber menyebutkan bahwa Digipay juga turut serta dalam memperkuat program Bangga Buatan Indonesia (Luwuk, 2022; Sulsel, 2022), meskipun detail implementasi promosi ini tidak selalu dijelaskan secara rinci dalam sumber yang tersedia. Dapat diasumsikan bahwa kerjasama dengan program Bangga Buatan Indonesia dapat berupa kampanye bersama, *branding*, atau integrasi data.

Lebih lanjut, Digipay memfasilitasi pembelian produk dalam negeri oleh instansi pemerintah melalui proses transaksi yang efisien dan transparan (Luwuk, 2022; Nadia, n.d.). Proses verifikasi dan validasi dilakukan secara *online*, meminimalisir potensi kecurangan dan memastikan akuntabilitas pengadaan (Luwuk, 2022). Mekanisme pembayaran digital melalui Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan/atau *Cash Management System Virtual Account* (CMS VA) menyederhanakan proses pembayaran dan administrasi (Nadia, n.d.). Kemudahan ini mendorong instansi pemerintah untuk lebih memilih produk dalam negeri yang tersedia di Digipay dibandingkan proses pengadaan konvensional yang lebih rumit (Rachmadi, n.d.).

Digipay juga memiliki keunggulan dalam hal integrasi antara *marketplace*, pembayaran digital, dan pemungutan/pembayaran pajak yang dilakukan secara *online*. (Luwuk, 2022; Nadia, n.d.). Integrasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga mempermudah pemantauan dan pelaporan, yang penting dalam konteks akuntabilitas penggunaan anggaran negara. Dengan demikian, Digipay tidak hanya mempromosikan produk dalam negeri, tetapi juga menciptakan ekosistem yang mendukung pembelian produk tersebut oleh instansi pemerintah secara efektif dan efisien. Fokus pada UMKM dan produk lokal, kemudahan akses bagi Satker, dan proses transaksi yang transparan menjadikan Digipay sebagai instrumen penting dalam mendorong keberhasilan gerakan Bangga Produk Indonesia.

Implementasi Digipay dalam Perspektif Neo-Weberian State (NWS)

Implementasi Digipay dapat dianalisis melalui lensa NWS, sebuah

konsep yang merepresentasikan evolusi dari birokrasi Weberian klasik. Digipay, sebagai platform digital untuk pengadaan barang/jasa pemerintah, mencerminkan beberapa karakteristik NWS dalam implementasinya. Salah satu karakteristik utama NWS yang tercermin dalam Digipay adalah orientasi pada hasil. Digipay tidak hanya berfokus pada proses pengadaan yang efisien, tetapi juga pada dampak yang dihasilkan, yaitu pemberdayaan UMKM dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri (Nadia, n.d.; Rachmadi, n.d.). Dengan memfasilitasi akses UMKM ke pasar pemerintah dan mempromosikan produk lokal, Digipay berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan. Hal ini sejalan dengan penekanan NWS pada pencapaian *outcome* yang terukur dan berdampak positif bagi masyarakat (Bouckaert, 2023; Gomide & Lotta, 2024).

Selain itu, Digipay juga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengadaan pemerintah. Setiap transaksi tercatat secara digital dan dapat diakses oleh pihak yang berwenang, meminimalisir potensi korupsi dan penyalahgunaan anggaran (Luwuk, 2022). Mekanisme pembayaran digital melalui KKP dan CMS VA juga mempermudah pemantauan dan audit. Transparansi dan akuntabilitas ini merupakan elemen penting dalam NWS, yang menekankan pada pertanggungjawaban publik atas penggunaan sumber daya negara (Galego & Nieto-Morales, 2024; Gomide & Lotta, 2024; Ongaro, 2024).

Lebih lanjut, Digipay menunjukkan fleksibilitas dan responsivitas terhadap kebutuhan *stakeholder*. Platform ini dirancang untuk mudah digunakan oleh UMKM dan Satker, serta terus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan yang

berubah (Hidayati, 2022). Kemudahan pendaftaran *online*, proses transaksi yang sederhana, dan dukungan teknis yang tersedia merupakan contoh responsivitas Digipay terhadap kebutuhan pengguna. Fleksibilitas dan responsivitas ini merupakan karakteristik penting NWS yang membedakannya dari birokrasi Weberian yang cenderung kaku dan kurang adaptif (Bouckaert, 2023).

Terakhir, implementasi Digipay juga mencerminkan profesionalisme yang berorientasi pada nilai publik. Pengembangan dan pengelolaan Digipay melibatkan profesional dari berbagai bidang, termasuk teknologi informasi, keuangan, dan administrasi publik. Fokus utama Digipay adalah memberikan pelayanan yang efisien, transparan, dan akuntabel bagi masyarakat, khususnya UMKM dan instansi pemerintah. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai publik yang ditekankan dalam NWS, yaitu pelayanan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan didukung oleh profesionalisme yang tinggi (Bouckaert, 2023).

Dengan demikian, implementasi Digipay mencerminkan beberapa karakteristik utama NWS, yaitu orientasi pada hasil, akuntabilitas dan transparansi, fleksibilitas dan responsivitas, serta profesionalisme yang berorientasi pada nilai publik. Digipay dapat dilihat sebagai salah satu contoh penerapan prinsip-prinsip NWS dalam konteks pengadaan pemerintah di Indonesia, yang berupaya menciptakan birokrasi yang lebih efisien, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tantangan dan Peluang Implementasi Digipay

Implementasi Digipay, meskipun menawarkan banyak manfaat, juga

menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi agar platform ini dapat beroperasi secara optimal dan memberikan dampak yang maksimal. Identifikasi tantangan dan peluang pengembangan di masa mendatang sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas Digipay dalam mendukung pengadaan pemerintah dan pemberdayaan UMKM.

Salah satu tantangan utama dalam implementasi Digipay adalah terkait dengan infrastruktur dan literasi digital. Ketergantungan pada konektivitas internet yang stabil dan merata di seluruh wilayah Indonesia menjadi kendala tersendiri, terutama di daerah-daerah terpencil (Banjarmasin, 2024; Ichsan, 2022; Saptati, 2024). Selain itu, tingkat literasi digital yang belum merata di kalangan UMKM dan bendahara pengeluaran Satker juga menjadi tantangan. Banyak pihak yang masih terbiasa dengan transaksi tunai dan belum sepenuhnya memahami proses transaksi digital melalui Digipay. Hal ini memerlukan upaya edukasi dan pelatihan yang berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman dan penggunaan platform (Rahman & Sofani, n.d.; Saptati, 2024).

Tantangan lain yang dihadapi adalah terkait dengan perbedaan mekanisme Digipay antar bank pemerintah. Perbedaan ini dapat membingungkan pengguna, baik dari pihak Satker maupun UMKM, dan menghambat kelancaran transaksi. Diperlukan standarisasi atau harmonisasi mekanisme Digipay antar bank Himbara untuk mempermudah penggunaan dan meningkatkan efisiensi (Ichsan, 2022). Selain itu, keterbatasan SDM pada pihak penyedia barang/jasa, terutama UMKM, dalam mengoperasikan Digipay juga menjadi perhatian (Rahman & Sofani, n.d.). UMKM perlu memiliki SDM yang kompeten dalam menggunakan platform

digital untuk mengelola transaksi dan mempromosikan produk mereka (Banjarmasin, 2024; Rahman & Sofani, n.d.).

Meskipun menghadapi tantangan, Digipay juga menawarkan peluang pengembangan yang besar di masa mendatang. Salah satu peluangnya adalah perluasan fitur dan layanan yang ditawarkan di platform. Selain transaksi pengadaan barang/jasa, Digipay dapat dikembangkan untuk memfasilitasi layanan lain, seperti pembayaran tagihan, pengelolaan inventaris, atau akses ke pembiayaan (Felama, 2022). Hal ini akan menjadikan Digipay sebagai platform yang lebih komprehensif dan memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi pengguna.

Peluang lain adalah peningkatan integrasi dengan sistem lain yang relevan, seperti sistem perpajakan dan sistem informasi keuangan pemerintah. Integrasi ini akan meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara (Banjarmasin, 2024; Saptati, 2024). Selain itu, kerjasama dengan e-commerce swasta juga dapat dieksplorasi untuk memperluas jangkauan pasar bagi UMKM dan meningkatkan daya saing produk lokal (Felama, 2022). Peningkatan sosialisasi dan edukasi secara masif kepada seluruh stakeholder, baik Satker maupun UMKM, juga sangat penting untuk meningkatkan adopsi dan pemanfaatan Digipay secara optimal (Banjarmasin, 2024).

Dengan mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada, Digipay berpotensi menjadi instrumen yang sangat efektif dalam mendukung pengadaan pemerintah yang transparan dan efisien, serta memberdayakan UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Sinergi yang kuat antara pemerintah, perbankan, UMKM, dan *stakeholder* terkait sangat

dibutuhkan untuk mewujudkan potensi Digipay secara maksimal.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Digipay merupakan inovasi yang signifikan dalam pengadaan pemerintah di Indonesia, yang berpotensi besar dalam memberdayakan UMKM dan mendorong gerakan Bangga Produk Indonesia. Implementasi Digipay juga mencerminkan karakteristik *Neo-Weberian State* (NWS) dengan penekanan pada orientasi hasil, akuntabilitas, transparansi, responsivitas, dan profesionalisme. Implementasi Digipay menghadapi tantangan terkait infrastruktur dan literasi digital, perbedaan mekanisme antar bank Himbara, dan keterbatasan SDM. Namun, terdapat peluang pengembangan melalui perluasan fitur dan layanan, integrasi dengan sistem lain, dan peningkatan sosialisasi.

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan implementasi Digipay:

1. Peningkatan Infrastruktur dan Literasi Digital: Pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan infrastruktur internet di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah terpencil. Program pelatihan dan edukasi tentang literasi digital perlu digencarkan, ditargetkan bagi UMKM dan bendahara pengeluaran Satker. Pelatihan ini sebaiknya mencakup penggunaan platform Digipay secara praktis, pengelolaan keuangan digital, dan pemanfaatan data transaksi.
2. Harmonisasi Mekanisme Digipay: Perlu adanya standarisasi atau harmonisasi mekanisme Digipay antar bank Himbara untuk

mempermudah penggunaan dan meningkatkan efisiensi transaksi. Hal ini dapat dilakukan melalui koordinasi yang lebih intensif antara Kementerian Keuangan dan bank-bank Himbara.

3. Penguatan Kapasitas SDM UMKM: Pemerintah perlu memberikan dukungan kepada UMKM dalam penguatan kapasitas SDM, khususnya dalam bidang pengelolaan digital dan pemasaran online. Program pendampingan dan inkubasi bisnis dapat diberikan untuk membantu UMKM memanfaatkan Digipay secara optimal.
4. Perluasan Fitur dan Layanan: Digipay perlu terus dikembangkan dengan menambahkan fitur dan layanan baru yang relevan dengan kebutuhan pengguna, seperti pengelolaan inventaris, akses ke pembiayaan, dan integrasi dengan sistem perpajakan. Pengembangan ini harus didasarkan pada feedback dari pengguna dan analisis kebutuhan pasar.
5. Peningkatan Integrasi Sistem: Integrasi Digipay dengan sistem lain yang relevan, seperti sistem informasi keuangan pemerintah dan e-commerce swasta, perlu ditingkatkan untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih terpadu dan efisien. Integrasi ini juga dapat membuka peluang kerjasama dan memperluas jangkauan pasar bagi UMKM.
6. Sosialisasi dan Edukasi yang Masif: Sosialisasi dan edukasi tentang Digipay perlu dilakukan secara masif dan berkelanjutan kepada seluruh stakeholder, baik Satker maupun UMKM, melalui berbagai kanal komunikasi, seperti media sosial, website, seminar, dan pelatihan.
7. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan: Implementasi Digipay perlu dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi

kendala dan peluang perbaikan. Evaluasi ini harus melibatkan stakeholder terkait dan hasilnya dipublikasikan secara transparan.

Dengan mengimplementasikan saran-saran di atas, diharapkan Digipay dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pengadaan pemerintah yang transparan dan efisien, pemberdayaan UMKM, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Implementasi yang sukses juga akan memperkuat citra pemerintah sebagai institusi yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Banjarmasin, K. (2024, February 2). *Marketplace Pemerintah Menjadi Peluang Pasar Bagi Produk UMKM*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/banjarmasin/id/data-publikasi/berita-terbaru/2934-marketplace-pemerintah-menjadi-peluang-pasar-bagi-produk-umkm.html>
- Bouckaert, G. (2023). The Neo-Weberian State: From Ideal Type Model to Reality? *Max Weber Studies*, 23(1), 13–59.
- Felama, I. H. (2022, November 7). Tantangan Implementasi Digipay. *Ekorantt.com*. <https://ekorantt.com/2022/11/07/tantangan-implementasi-digipay/>
- Galego, D., & Nieto-Morales, F. (2024). Navigating Public Administration Reforms and Democracy: Toward a Neo-Weberian State in Mexico. *Journal of Policy Studies*, 39(2), 37–49. <https://doi.org/10.52372/jps39204>
- Gomide, A., & Lotta, G. (2024). Building Resilience, Agility, and Trust: The Neo-Weberian State as a Referential Model for Brazilian Public Administration. *Journal of*

- Policy Studies*, 39(3), 45–55.
<https://doi.org/10.52372/jps39304>
- Hardiputra, A. J. (2022, March 7). *DigiPay, Lebih dari Sekadar Platform Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. KPPN Surabaya II| Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara - DJPb Kemenkeu RI Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/surabaya2/id/data-publikasi/berita-terbaru/2913-digipay,-lebih-dari-sekadar-platform-pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah.html>
- Hidayati, N. (2022, November 30). *Mengenal Digipay, Aplikasi Belanja Online untuk Pemberdayaan UMKM*. <https://opini.harianjogja.com/read/2022/11/30/543/1119127/mengenal-digipay-aplikasi-belanja-online-untuk-pemberdayaan-umkm>
- Ichsan, A. (2022, June 2). *Transformasi Belanja Pemerintah Dalam Mendukung Cashless Society (Digipay-Market Place)*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sulut/id/data-publikasi/artikel/3070-transformasi-belanja-pemerintah-dalam-mendukung-cashless-society-digipay-market-place.html>
- Im, T., & Cha, S. (2024). The Hierarchy-Oriented Bureaucracy of South Korea: A Type of Neo-Weberian State? *Journal of Policy Studies*, 39(2), 51–62.
<https://doi.org/10.52372/jps39205>
- Kemenkeu, K. (2024, September 1). *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*. [https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/korupsi-dalam-pengadaan-barang-dan-jasa-tantangan-bagi-umkm-lokal-](https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/korupsi-dalam-pengadaan-barang-dan-jasa-tantangan-bagi-umkm-lokal-untuk-berpartisipasi-dalam-proyek-pemerintah-83b47d4b/detail/)
- [untuk-berpartisipasi-dalam-proyek-pemerintah-83b47d4b/detail/](https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/korupsi-dalam-pengadaan-barang-dan-jasa-tantangan-bagi-umkm-lokal-untuk-berpartisipasi-dalam-proyek-pemerintah-83b47d4b/detail/)
- KPPN, R. (2021, October 29). *Digipay-Marketplace, Sebuah Solusi dan Tantangan*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bangko/id/data-publikasi/artikel/2828-digipay-marketplace,-sebuah-solusi-dan-tantangan.html>
- Londa, I., Afrilian, A., Anugrah, R., LTKL, & Shearman. (2022). *Peningkatan Peran UMKM dan Koperasi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Berkelanjutan Pemerintah Pusat dan Daerah*. SEED.
- Luwuk, K. (2022, July 28). *Digital Payment, Marketplace Pemerintah Memberdayakan UMKM*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/luwuk/id/data-publikasi/berita-terbaru/2885-digital-payment,-marketplace-pemerintah-memberdayakan-umkm.html>
- Nadia, S. (n.d.). *Digipay sebagai Solusi Toko Online antara Pemerintah dengan UMKM*. Retrieved 20 December 2024, from <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pontianak/baca-artikel/14527/digipay-sebagai-solusi-toko-online-antara-pemerintah-dengan-umkm.html>.
- Ongaro, E. (2024). Integrating the Neo-Weberian State and Public Value. *International Review of Administrative Sciences*, 90(4), 830–844.
<https://doi.org/10.1177/00208523241228830>
- Patulak, Y. (2024, Desember). *Pemberdayaan UMKM dengan Senjata Bernama “Digipay”*. Sulteng Raya. <https://sultengraya.com/read/1834>

- 70/pemberdayaan-umkm-dengan-senjata-bernama-digipay/
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. (2024). In *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*. https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pengadaan_Barang_dan_Jasa_Pemerintah&oldid=25170623
- Rachmadi. (n.d.). *Digipay, Salah Satu Upaya Kemenkeu Melakukan Digitalisasi Transaksi Belanja APBN Sekaligus Digitalisasi UMKM*. Retrieved 21 December 2024, from <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16046/Digipay-Salah-Satu-Upaya-Kemenkeu-Melakukan-Digitalisasi-Transaksi-Belanja-APBN-Sekaligus-Digitalisasi-UMKM.html>
- Rahman, M. T., & Sofani, M. (n.d.). *Implementasi DIGIPay Marketplace*. ANTARA News Kalimantan Selatan. Retrieved 21 December 2024, from <https://kalsel.antaranews.com/berita/349837/opini-implementasi-digipay-marketplace>
- Saptati, R. (2024, February 16). *Digital Payment Optimalkan Pengelolaan Kas Negara dan Kembangkan UMKM*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuklinggau/id/data-publikasi/artikel/3619-digital-payment-optimalkan-pengelolaan-kas-negara-dan-kembangkan-umkm.html>
- Sulsel, R. K. Djpb. (2022, August 4). *Digipay dan KUR menjadi sinyal perubahan UMKM Go Digitalisasi*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sulsel/id/data-publikasi/berita-terbaru/2878-digipay-dan-kur-menjadi-sinyal-perubahan-umkm-go-digitalisasi.html>
- Supriyanto, B. E. (2024, August 18). *Peran Digipay Satu Dalam Mendukung Program Transformasi Digital Pemerintah*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/watampone/id/data-publikasi/berita-terbaru/3697-peran-digipay-satu-dalam-mendukung-program-transformasi-digital-pemerintah.html>
- Syahrani, F., Ridho Fadilah, I., Nurohim, R., Harto, H., Sandrina Salsabila, G., Nurhaliza, S., Handayani, D. F., Hilyati, I., Linisa Hamzah, A. H., Khairunnisa, F. Z., & Salsabila Ardan, T. (2024). Pelatihan Digital Marketing Dan Pameran UMKM Sebagai Sarana Pengembangan Strategi Pemasaran: Studi Kasus Umkm Desa Tanjungsang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 5(1), 259–266. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1.1847>
- Tambunan, T. T. H. (2009). *UMKM di Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Utami, E. S. (2022, December 23). *Digipay Satu untuk Pembangunan Ekonomi yang Lebih Baik*. DJPb | Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI. <https://djpb.kemenkeu.go.id/portals/id/berita/lainnya/opini/4037-digipay-satu-untuk-pembangunan-ekonomi-yang-lebih-baik.html>